

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana di kabupaten ini terdapat salah satu kecamatan yang paling rendah letaknya dari permukaan laut yaitu Kecamatan Sape

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Transportasi merupakan tolak ukur dalam interaksi antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah, transportasi memiliki contoh berupa angkutan penyeberangan.

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Oleh karena itu keberadaan angkutan penyeberangan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengguna jasa agar dalam pelayanannya pengguna jasa terlayani dengan baik. Terdapat banyak pelabuhan angkutan penyeberangan di Indonesia yang melayani berbagai lintasan komersil maupun lintasan perintis, salah satu dari pelabuhan penyeberangan tersebut adalah Pelabuhan Penyeberangan Sape yang berada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan Penyeberangan Sape merupakan salah satu pelabuhan penyeberangan komersil yang di kelola oleh PT. ASDP Cabang Sape yang terletak di Kabupaten Bima yang berada dalam wilayah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Pelabuhan Sape melayani 2 lintasan, yaitu Sape – Labuan Bajo, dan Sape – Waingapu.

Pelabuhan ini menunjang pengangkutan hasil – hasil pertanian, kebutuhan bahan bangunan, industri, pariwisata, serta menciptakan lalu lintas angkutan penumpang, barang dan kendaraan. Pelabuhan Sape melayani lintasan komersil yang didukung dengan 3 (tiga) kapal yaitu KMP. Cakalang untuk lintasan Sape – Labuan Bajo, KMP. Cucut untuk lintasan Sape – Waingapu, KMP. Komodo untuk lintasan pariwisata di Labuan Bajo.

Pada kondisi saat ini Pelabuhan Sape masih belum berfungsi secara optimal karena masih belum diterapkan sistem zonasi pada pelabuhan seperti masih ada pedagang memasuki area dermaga, pengantar dan/atau penjemput memasuki lapangan siap muat, penumpang menunggu keberangkatan kapal diatas dermaga *Movable Bridge* serta bercampurnya penumpang dan kendaraan, dan terjadinya pertemuan (*crossing*) antara kendaraan masuk dan kendaraan keluar yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di Pelabuhan. Sementara saat ini pihak pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait dengan system zonasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Peyeberangan.

Berdasarkan uraian dari hasil survey yang dilakukan dan juga dilihat dari kondisi yang ada, maka dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini penulis mengambil judul : **“OPTIMALISASI POLA ARUS LALU LINTAS KENDARAAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN SAPE, KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1.2 Rumusan Permasalahan

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Apakah penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Sape sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan?

2. Apakah pengaturan pola lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Sape sudah sesuai dengan standar operasional prosedur pada Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai persyaratan kelulusan pendidikan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang program studi Diploma III LLASDP dan yang menjadi tujuan dari pembahasan masalah yang diambil pada Pelabuhan Penyeberangan Sape adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Sape agar sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan
2. Menganalisa pengaturan pola lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Sape agar sesuai dengan standar operasional prosedur pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan KKW ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Taruna

Manfaat bagi taruna dalam pembuatan KKW ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam mengikuti Pendidikan Diploma III LLASDP dan merupakan salah satu persyaratan akhir untuk menyelesaikan program Diploma III LLASDP. Selain itu, penulisan KKW ini juga menjadi referensi adik tingkat sebagai bahan belajar.

2. Manfaat Bagi Lembaga / Instansi

Memberikan saran kepada instansi terkait dalam hal ini PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) atau arahan pada perbaikan pola sistem zonasi pada Pelabuhan Penyeberangan Sape sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa.

Selain itu juga diharapkan Pemerintah Daerah setempat agar dapat berupaya memperhatikan sistem operasional Pelabuhan Penyeberangan Sape serta sebagai masukan untuk perencanaan di masa yang akan datang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib ini Tidak Menyimpang dan meluas dari focus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan. Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini diberikan batasan pembahasan terhadap penerapan sistem zona, pengaturan pola lalu lintas kendaraan pelabuhan

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Perbedaan Pembahasan KKW

PEMBAHASAN	FAJAR HARIYADI	M. DUWICAHYO
Judul KKW	Tinjauan Sistem Zona dan Pola Lalu Lintas Pada Pelabuhan Penyeberangan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat	Optimalisasi Pola Arus Lalu Lintas Kendaraan di pelabuhan Penyeberangan Sape Kabupaten Bima Provinsi nusa Tenggara Barat
Tempat Penelitian	Pelabuhan Penyeberangan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pelabuhan Penyeberangan Sape Kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun	2015	2020

Analisa Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Pola Arus Lalu Lintas 2. Analisa Penentuan zona 3. Analisa Penertiban Pengguna Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Pola Arus Lalu Lintas 2. Analisa Penentuan Zona 3. Analisa Perlengkapan Sistem Zona
Peraturan yang Digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu lintas Penyeberangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PM 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. 2. SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu lintas Penyeberangan